

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia secara jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 33 yang berkaitan dengan demokrasi ekonomi. Salah satu tujuan dari demokrasi ekonomi adalah ekonomi yang berorientasi pada rakyat, yang didorong untuk menjadi tangguh dan mandiri. Pembangunan nasional sendiri merupakan proses yang dirancang secara sistematis dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh, bukan hanya untuk individu atau kelompok tertentu (Putra et al., 2022). Secara lebih jelasnya tujuan utama pembangunan nasional pada hakikatnya adalah menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera melalui pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan warga negara.

Dijelaskan pada (Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, 2025) berdasarkan kajian terhadap asas atau prinsip yang menjadi pedoman dalam perumusan norma, penyusunan tersebut merujuk pada prinsip penyelenggaraan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Salah satu prinsip yang ditekankan adalah kemandirian, dengan tetap mempertahankan keseimbangan antara kemajuan dan persatuan nasional. Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, prinsip ini diwujudkan melalui pendekatan pembangunan yang diarahkan, salah satunya, untuk mencapai kemandirian ekonomi. Namun demikian, pencapaian tujuan pembangunan nasional tersebut masih dihadapkan pada berbagai permasalahan sosial dan ekonomi hingga saat ini.

Salah satu permasalahan utama yang masih dihadapi dalam proses pembangunan nasional adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 sekitar 25,90 juta, angka ini turun dari 26,36 juta pada Maret 2022. Tentunya persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan, dari 9,54% pada Maret 2022 menjadi 9,36% pada Maret 2023 (Purwanti, 2024). Meskipun tampak ada penurunan persentase, namun kemiskinan di Indonesia masih merupakan masalah yang serius. Permasalahan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan, tetapi hal ini akan menjalar juga pada keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta partisipasi dalam kegiatan ekonomi. Kemiskinan juga berpengaruh terhadap rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi diri dan berpartisipasi

secara optimal dalam proses pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan bersifat kompleks dan saling berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan. Kondisi kemiskinan ini erat kaitannya dengan permasalahan pengangguran, karena ketiadaan pekerjaan atau terbatasnya kesempatan kerja secara langsung berdampak pada rendahnya pendapatan masyarakat.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta, dari total 147,71 juta angkatan kerja (Frisnoiry et al., 2024). Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya ditunjukkan oleh tingginya jumlah angkatan kerja yang belum sepenuhnya terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia. Pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan ketersediaan kesempatan kerja mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam sistem ketenagakerjaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pengangguran tidak hanya berkaitan dengan jumlah tenaga kerja, tetapi juga dengan kemampuan sektor ekonomi dalam menyediakan peluang kerja yang memadai bagi masyarakat.

Lebih lanjut, permasalahan pengangguran memiliki karakter yang kompleks dan berkelanjutan karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pola penyiapan tenaga kerja, orientasi masyarakat terhadap sektor formal, serta keterbatasan penciptaan lapangan kerja baru. Dalam konteks ini, tantangan yang dihadapi tidak hanya terbatas pada upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang siap bekerja, tetapi juga pada upaya mendorong terbentuknya aktivitas

ekonomi yang mampu menciptakan kesempatan kerja secara mandiri. Kondisi tersebut menuntut adanya pergeseran paradigma, dari yang semula berorientasi sebagai pencari kerja menuju kemampuan menciptakan peluang kerja (Daulay, 2020). Seiring dengan kebutuhan tersebut, aktivitas ekonomi berbasis masyarakat menjadi semakin relevan untuk diperhatikan.

Aktivitas ekonomi ini berperan sebagai alternatif dalam menyediakan kesempatan kerja, khususnya bagi masyarakat yang belum terserap di sektor formal. Dalam perkembangan selanjutnya, salah satu bentuk aktivitas ekonomi masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara luas adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tentang UMKM (2008) Pasal 1, usaha mikro merujuk pada usaha yang dimiliki oleh individu atau usaha yang memenuhi standar yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut (Aliyah, 2022). Di Indonesia, UMKM merupakan salah satu cara paling efektif untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan data statistik, UMKM merupakan kelompok usaha terbesar. UMKM merupakan salah satu kontributor utama perekonomian Indonesia dan faktor kunci dalam pemulihan ekonomi negara selama krisis ekonomi (Siagian & Indra, 2019) dalam (Syadzali, 2020). UMKM menyumbangkan sekitar 99% dari total unit usaha di negara ini, berkontribusi sebesar 60,51% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dan menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. UMKM juga menciptakan peluang kerja, mendistribusikan pendapatan, mendorong

pertumbuhan ekonomi lokal, dan berfungsi sebagai platform bagi masyarakat umum untuk mengembangkan kreativitas dan potensi (Aliyah, 2022).

UMKM muncul dari inisiatif masyarakat, memanfaatkan sumber daya yang tersedia, serta berpotensi menciptakan lapangan kerja secara bertahap dan berkelanjutan. Keberadaan UMKM yang muncul dari inisiatif masyarakat, memanfaatkan sumber daya yang tersedia, serta dikelola secara mandiri menunjukkan bahwa sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat yang mampu menciptakan lapangan kerja secara bertahap dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat menitikberatkan pembangunan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan, serta penghilangan berbagai hambatan ekonomi melalui program-program pendukung (Ismoyowati et al., 2019). Kemudian dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna sebagai potensi atau dorongan untuk meningkatkan kemampuan individu atau komunitas untuk menjadi mandiri. Upaya-upaya ini merupakan tahapan dalam proses pemberdayaan untuk mengubah perilaku, kebiasaan lama, atau perilaku baru demi kebaikan guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Pemberdayaan juga berfokus pada proses itu sendiri, bukan pada hasilnya. Karena itu, tingkat keberhasilan pemberdayaan ditentukan oleh jumlah partisipasi atau kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh individu dan komunitas. Semakin banyak orang yang terlibat dalam proses tersebut, semakin besar pula keberhasilan proyek tersebut (Nindatul, 2019). Berdasarkan karakteristik pemberdayaan yang meliputi

proses, partisipasi, dan kemandirian, diperlukan model pemberdayaan yang dapat memfasilitasi implementasi pemberdayaan secara sistematis dan berkelanjutan. Model pemberdayaan berfungsi sebagai kerangka konseptual yang menjelaskan langkah-langkah, strategi, dan perspektif berbagai pemangku kepentingan dalam proses pemberdayaan.

Terdapat berbagai model pemberdayaan masyarakat yang beragam seperti, Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Desa Wisata di Kabupaten Buton Selatan. Penelitian ini dilakukan oleh Sadat et al (2021) yang melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat berbasis potensi desa wisata dengan pantai pasir putih yang kemudian berupaya mengubah lingkungannya menjadi desa wisata bahari. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Herlon et al (2023) yakni Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kepemilikan Lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Penelitian ini membahas mengenai model pemberdayaan berbasis tanah guna menjalankan usaha, kemudian penelitian ini mengkaji model pemberdayaan tanah berbasis kemitraan, berbasis penataan tata ruang, berbasis *corporate sosial responsibility*. Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal (Studi Pada UKM Pembuatan Kopi Muria) yang dilakukan oleh (Syadzali, 2020). Penelitian ini membahas mengenai potensi lokal pada UKM pembuatan kopi muria dengan menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam proses produksi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha.

Namun, disadari bahwa program-program pemberdayaan ini tidak selalu mampu mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Model-model pemberdayaan yang ada cenderung kurang menekankan pada kreativitas individu. Banyak dari program-program ini lebih fokus pada pemberian modal, seperti pinjaman, tanpa memberikan pendidikan atau pembekalan keterampilan yang memadai (Putra, 2007) dalam (Jamaluddin et al., 2019). Model program pemberdayaan masyarakat yang hanya berfokus pada pembayaran modal atau pinjaman mungkin tidak memberikan solusi yang efektif untuk mengatasi semua aspek masalah. Situasi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan yang diberikan, tetapi juga oleh proses pembentukan kemampuan dan sikap masyarakat dalam mengelola potensi yang dimiliki. Ketika aspek kreativitas dan pembelajaran belum menjadi perhatian utama, program pemberdayaan cenderung berjalan parsial dan kurang berkelanjutan. Atas dasar pemahaman tersebut, diperlukan pendekatan yang lebih luas dan menyeluruh dalam melihat pemberdayaan masyarakat. Salah satu pendekatan yang relevan adalah model pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kewarganegaraan (*ekonomi civic*), yang memadukan penguatan ekonomi dengan nilai-nilai partisipasi dan tanggung jawab sosial. Ekonomi Kewarganegaraan (*ekonomi civic*) memberikan gambaran pengetahuan warga negara dalam menumbuhkan kesadaran dan wawasan untuk mengembangkan potensi diri serta berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan guna meningkatkan daya saing ekonomi di tingkat global (Asyafiq, 2019). Melalui model ini, kegiatan ekonomi

tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan masyarakat yang berdaya dan berperan aktif dalam pembangunan.

Dalam konteks penerapan pemberdayaan masyarakat berbasis *ekonomi civic* tersebut, praktik pemberdayaan yang tumbuh dari aktivitas ekonomi masyarakat lokal menjadi menarik untuk dikaji secara lebih mendalam. Salah satu bentuk nyata dari aktivitas tersebut dapat dilihat pada kelompok masyarakat yang bergerak dalam usaha pembuatan tas anyaman plastik. Kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada produksi barang, tetapi juga melibatkan proses pembelajaran bersama, serta penguatan peran masyarakat sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi. Melalui aktivitas ini, masyarakat secara perlahan membangun kemandirian ekonomi dengan memanfaatkan keterampilan dan kreativitasnya.

Pola pemberdayaan yang diterapkan dalam kelompok pembuat tas anyaman plastik ini menunjukkan karakteristik *ekonomi civic* yang menekankan pada pengembangan kemandirian masyarakat. Aktivitas ekonomi yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada hasil produksi, tetapi juga dirancang sebagai proses pembelajaran yang melatih masyarakat untuk mengembangkan keterampilan secara mandiri. Melalui pendampingan dan keterlibatan dalam seluruh tahapan usaha, masyarakat didorong untuk mengenali potensi diri, meningkatkan kemampuan teknis, serta mengelola kegiatan usaha secara bertahap tanpa ketergantungan pada bantuan eksternal. Pola ini memungkinkan tumbuhnya rasa tanggung jawab, kepercayaan diri, dan kemampuan berinisiatif

dalam mengelola aktivitas ekonomi. Dengan demikian, kegiatan pembuatan tas anyaman plastik tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghasilan, tetapi juga menjadi sarana pembentukan kemandirian masyarakat yang mendukung keberlanjutan ekonomi lokal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk mengkaji secara khusus model pemberdayaan masyarakat yang diterapkan melalui kegiatan pembuatan tas anyaman plastik pada UMKM Sumber Rezeki, karena UMKM ini memiliki peran yang signifikan dalam pemberdayaan masyarakat. Tidak hanya seperti sebagian besar UMKM yang secara umum hanya mempekerjakan seseorang di rumah produksinya lalu memberikan upah seperti umumnya UMKM produksi tahu, produksi keripik-keripik dan lainnya. Namun UMKM Sumber Rezeki memberikan pelatihan kepada masyarakat yang tergabung di dalamnya mengenai cara pembuatan tas anyaman plastik, mulai dari tahap awal hingga masyarakat mampu menganyam secara mandiri. Setelah memiliki keterampilan tersebut, masyarakat tidak diwajibkan untuk mengeluarkan modal awal guna bergabung dalam UMKM ini. Konsep kerja yang diterapkan oleh UMKM Sumber Rezeki memungkinkan masyarakat untuk melakukan proses produksi secara fleksibel, yaitu dengan mengerjakan anyaman tas plastik di rumah masing-masing. Bahan baku produksi disediakan oleh pihak UMKM, sehingga masyarakat tidak perlu menanggung biaya pembelian bahan. Selanjutnya, hasil anyaman yang telah selesai dikerjakan disetorkan kembali kepada UMKM, dan masyarakat yang tergabung akan memperoleh upah sesuai dengan hasil kerja yang disetorkan. Pola ini menunjukkan adanya sistem kerja yang mendukung

kemandirian ekonomi masyarakat tanpa membebani mereka dengan risiko permodalan.

Sejalan dengan kondisi tersebut, praktik pemberdayaan yang berjalan di tingkat akar rumput sering kali belum terdokumentasi dan dipahami secara sistematis sebagai sebuah model pemberdayaan. Padahal, pola-pola yang diterapkan oleh kelompok pembuat tas anyaman plastik memiliki potensi untuk dikembangkan dan dijadikan rujukan bagi masyarakat atau kelompok lain yang ingin membangun kegiatan pemberdayaan serupa. Tanpa adanya kajian yang mendalam, praktik pemberdayaan tersebut berisiko hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi biasa, tanpa melihat nilai-nilai, tahapan, dan strategi pemberdayaan yang sebenarnya terkandung di dalamnya. Maka dari itu, kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami bagaimana model pemberdayaan tersebut dijalankan, tetapi juga untuk mengungkap nilai-nilai *ekonomi civic* yang melandasinya. Melalui penelitian ini, diharapkan model pemberdayaan yang telah diterapkan dapat dipaparkan secara sistematis, sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh bagi pembaca, sekaligus mendorong munculnya minat dan inspirasi bagi pihak lain untuk mengadaptasi atau mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat berbasis *ekonomi civic* sesuai dengan potensi yang dimiliki.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kondisi awal atau latar belakang terbentuknya pemberdayaan masyarakat pada UMKM Sumber Rejeki di Desa Kasreman Kabupaten Ngawi Tahun 2026.
2. Mengetahui model pemberdayaan yang diterapkan pada UMKM Sumber Rejeki dengan berbasis *Ekonomi Civic* ini melalui pembuatan tas anyaman plastik di Desa Kasreman Kabupaten Ngawi Tahun 2026.
3. Menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam model pemberdayaan masyarakat berbasis *ekonomi civic* melalui pembuatan tas anyaman plastik yang diterapkan oleh UMKM Sumber Rejeki di Desa Kasreman Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian, berikut diuraikan rumusan masalah ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi awal atau latar belakang terbentuknya pemberdayaan masyarakat pada UMKM Sumber Rejeki di Desa Kasreman, Kabupaten Ngawi Tahun 2026?
2. Bagaimana model pemberdayaan yang diterapkan pada UMKM Sumber Rejeki dengan berbasis *Ekonomi Civic* ini melalui pembuatan tas anyaman plastik di Desa Kasreman Kabupaten Ngawi Tahun 2026?
3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan model pemberdayaan masyarakat berbasis *ekonomi civic* melalui pembuatan tas anyaman plastik yang diterapkan oleh UMKM Sumber Rejeki di Desa Kasreman, Kabupaten Ngawi Tahun 2026?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis kondisi awal atau latar belakang terbentuknya pemberdayaan masyarakat pada UMKM Sumber Rejeki di Desa Kasreman Kabupaten Ngawi Tahun 2026.
2. Mendeskripsikan model pemberdayaan yang diterapkan pada UMKM Sumber Rejeki dengan berbasis *Ekonomi Civic* ini melalui pembuatan tas anyaman plastik di Desa Kasreman Kabupaten Ngawi Tahun 2026.
3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan model pemberdayaan masyarakat berbasis *ekonomi civic* yang diterapkan pada UMKM Sumber Rejeki di Desa Kasreman Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan teori model pemberdayaan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pendekatan *ekonomi civic*. Melalui pengembangan model pemberdayaan masyarakat berbasis *ekonomi civic*, penelitian ini dapat memperjelas keterkaitan antara aktivitas ekonomi masyarakat dengan nilai-nilai kewarganegaraan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas perspektif keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam melihat praktik ekonomi sebagai bagian

dari kajian pendidikan kewarganegaraan yang aplikatif. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi landasan konseptual bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji integrasi nilai kewarganegaraan dalam pengembangan model pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi UMKM Sumber Rejeki Kabupaten Ngawi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus rujukan strategis bagi UMKM Sumber Rejeki Kabupaten Ngawi dalam mengembangkan dan menyempurnakan model pemberdayaan masyarakat yang lebih partisipatif, terarah, dan berkelanjutan. Melalui analisis model pemberdayaan berbasis *ekonomi civic*, UMKM diharapkan mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, serta efektivitas pengelolaan usaha. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dalam memperluas peran UMKM tidak hanya sebagai unit usaha ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat yang mampu mendorong kemandirian ekonomi, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

b. Bagi Masyarakat Sekitar

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat melalui model pemberdayaan masyarakat yang memperkuat peran UMKM sebagai sumber penciptaan dan penyerapan tenaga kerja. Melalui model pemberdayaan berbasis *ekonomi civic*, masyarakat

didorong untuk terlibat secara aktif dan mandiri, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai tenaga kerja produktif. Melalui model ini, masyarakat tidak hanya memperoleh kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, tetapi juga mengalami penguatan kesadaran kewarganegaraan dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, UMKM tidak sekadar menjadi wadah penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran sosial yang mendukung kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara kolektif.

c. Bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan dalam merumuskan program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan UMKM. Model pemberdayaan yang dihasilkan dapat dijadikan referensi dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi lokal yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan pengangguran.

F. Definisi Istilah

1. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pengembangan kapasitas individu dan kolektif dalam komunitas untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran sehingga mereka dapat mengambil keputusan, serta memperbaiki kualitas hidup mereka sendiri secara berkelanjutan, menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek.

2. Model Pemberdayaan Masyarakat

Model pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kerangka konseptual yang digunakan sebagai acuan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi upaya pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kapasitas, kemandirian, serta kesejahteraan masyarakat. Model ini menekankan pada proses penguatan potensi lokal, peningkatan kemampuan individu dan kelompok, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya mereka.

3. Ekonomi Civic

Ekonomi civic adalah konsep aktivitas ekonomi yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang berorientasi pada kepentingan bersama, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Dalam penelitian ini, *ekonomi civic* dipahami sebagai pendekatan ekonomi yang mendorong partisipasi masyarakat dalam UMKM sebagai sarana peningkatan kesejahteraan bersama.